

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
KOLEKSI BIDANG ILMU  
TIDAK DIPINJAMKAN  
KHUSUS DIPALANGI DAN PERBUKALAN

# MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA MELALUI KEJAR USAHA

Oleh  
Jalius Hr

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DATE/TAHUN	Maret 1989
SUMBER/HARGA	Hadiah
KOLEKSI	U1
NO. INVENTARIS	1054/Hr/89 - m10 (2)
NO. FAKSI	374. 7AL m10

MILIK UFT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1989

## PENGANTAR

Sebenarnya tulisan ini merupakan langkah awal bagi penulis dalam berkarya ilmiah. Isinya diangkat materi ceramag yang penulis sampaikan pada tanggal 25 Agustus 1988 di Gedung UDKP Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Semua Argument yang ada dalam tulisan ini dirujuk dari literatur yang ada di dalam daftar kepustakaan.

Tulisan yang diberi judul " Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Melalui Kejar Usaha " dapat dijadikan salah satu jawaban permasalahan yang ada di pedesaan khususnya permasalahan penghasilan atau pendapatan masyarakat yang rendah dewasa ini dan pada masa yang akan datang.

Atas kehadiran tulisan ini di hadapan pembaca semoga ALLAH memberikan keberkatan pada kita semua, Amiin....

Padang , M a r e t 1989

Wassalam Penulis

J a l i u s HR

## DAFTAR ISI

Pengantar	.....	ii
Daftar Isi	.....	.iii
I. Pendahuluan	.....	1
II. Masyarakat Desa Dan Permasalahanya	.....	4
III. Pendidikan Sebagai Alternatif	.....	10
IV. K e j a r U s a h a	.....	16
V. Penutup	.....	29
Daftar Kepustakaan	.....	31
Lampiran		

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Dinamika pembangunan pada dewasa ini telah menyebar secara merata sampai kedesa-desa di seluruh Indonesia. Pembangunan itu sendiri sebenarnya adalah usaha perubahan menuju kearah yang lebih baik. Dalam rangka percepatan ( akselerasi ) usaha-usaha pembangunan dituntut adanya dan penyesuaian sikap masyarakat, perubahan cara bekerja tradisional didesa, dengan tetap mendasarkan kepada ciri-ciri khas masyarakat dan potensi desa.

Dari hasil sensus penduduk tahun 1980 didapat data bahwa jumlah penduduk seluruh Indonesia adalah 146.776.473 jiwa<sup>(1)</sup> yang terdiri dari 72.951.670 jiwa laki-laki dan 73.824.803 jiwa adalah wanita. Lebih lanjut dapat dikemukakan dari seluruh penduduk tersebut maka 113.950.704 jiwa tinggal dipedesaan atau sejumlah 78% tinggal dan hidup di daerah pedesaan. Mereka sebahagian besar bermata pencaharian disektor pertanian / agraris. Apabila ditinjau dari segi geografis maka kondisi-kondisi desa yang satu dengan yang lain lebih-lebih antara desa di provinsi yang satu dengan desa di provinsi yang lain sangatlah berbeda. Ada desa-desa yang kondisi tanahnya subur dan masih banyak yang belum diolah, karena penduduknya jarang dan suka berpindah-pindah dalam mengolah lahan pertanian. Sebaliknya ada desa-desa yang tanahnya sudah kurang subur tetapi diusahakan usaha-usaha intensifikasi dan ditambah lagi penduduknya sangat padat.

Walaupun Allah telah menetapkan rezeki bagi hambanya dengan ukuran yang telah ditetapkan, namun Ia dengan tegas mengatakan; terhadap penciptaan langit dan bumi, pada pertukaran malam dengan siang, adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir - Dan fikirkanlah oleh

---

(1). Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia, Sub Sensus Penduduk Tahun 1980. Jakarta Indonesia, Tahun 1982.

kamu apa yang telah kami jadikan di langit dan apa yang ada di bumi  
- Tidaklah sia-sia kami menciptakan perumpamaan semisal nyamuk. ( Q )

Oleh karena itu dalam rangka pembangunan nasional umumnya dan pembangunan pedesaan khususnya maka penggalan potensi (sumber daya) yang ada sebagai anugerah Tuhan di pedesaan sebenarnya sudah dan terus dijalankan untuk diwujudkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena berdasarkan pengamatan ternyata sampai sekarang belum secara maksimal dilaksanakan. Demi Masa sampai hari ini masih belum terlambat untuk berbuat kearah itu, sementara itu dilemma yang di hadapi masyarakat dipedesaan adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan kemiskinan. Air selokan / pancuran yang mengalir di belakang rumah dibiarkan berlalu begitu saja, tiada terfikir oleh mereka untuk dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Pekarangan rumah yang begitu luas dibiarkan ditumbuhi rumput dan semak, tiada terfikirkan oleh mereka untuk bertanam sayuran.

Karena struktur perekonomian sangat erat kaitanya dengan pengembangan sektor-sektor pata pencaharian masyarakat desa, maka diperlukan usaha <sup>dan</sup> memilih alternatif dalam hubunganya dalam mencapai tujuan perluasan kesempatan kerja dipedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini tidak perlu disangsikan lagi bahwa pendidikan berperan penting dalam setiap program perbaikan hidup di pedesaan. Setiap orang akan sependapat bahwa dengan berusaha sendiri-sendiri, khususnya dalam bidang pendidikan baik secara formal, informal dan non formal tidak akan mampu menghasilkan perbaikan hidup di pedesaan yang lebih berarti. Usaha pendidikan harus merupakan bagian integral dari seluruh kebijaksanaan yang terencana.

Pertimbangan-pertimbangan situasi dewasa ini diprioritaskan bagi pendidikan non-formal. Kemiskinan di pedesaan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, sedikit atau banyak akan dapat diselesaikan melalui jalur pendidikan ini. Pendidikan non-formal mencoba mengintegrasikan berbagai aktifitas pendidikan dengan proses berusaha dibidang perekonomian masyarakat di pedesaan, yaitu dengan program kelompok belajar berusaha. Jadi tulisan ini bermaksud menyajikan suatu alternatif dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dipedesaan dengan berbagai bentuk kegiatan pendidikan non-formal yang mungkin dapat dilaksanakan.

## MASYRAKAT DESA DAN PERMASALAHANYA

Dalam memahami pedesaan perlu adanya kesatuan pendapat tentang pengertian desa. Pada tulisan ini desa dapat diartikan sebagai suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan sosial yang hidup serta tinggal menetap di suatu daerah tertentu dengan adat-istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formal yaitu Kepala Desa.<sup>(2)</sup>

Kehidupan masyarakat desa umumnya tergantung dari usaha tani, nelayan dan sering disertai dengan usaha kerajinan tangan dan dagang kecil-kecilan. Untuk lebih tegasnya pengertian desa disederhanakan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Dengan demikian akan memberikan implikasi bahwa ada desa yang dekat dengan kota dan ada yang jauh dari kota.

Untuk lebih memahami keadaan masyarakat desa, dapat disimak ciri-ciri pokok<sup>(3)</sup> yang masih melekat pada masyarakat desa;

1. Nilai-budaya yang masih tetap berurat berakar pada masyarakat desa. Nilai-budaya gotong yang masih tetap merupakan ciri-ciri khusus spesifik dari masyarakat desa yang perlu terus dilestarikan.
2. Ditinjau dari taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat desa rata-rata masih relatif rendah, karena struktur mata pencaharian penduduk masih sangat cenderung dan dominan disektor pertanian tradisional.
3. Masyarakat desa dengan kemajemukannya dan dengan struktur masyarakatnya berupa lembaga-lembaga, norma-norma / adat-istiadat masih

---

(2). B.N. Marbun SH. Proses Pembangunan Desa  
Erlangga. Jakarta. Tahun 1980. halaman 19

(3). Drs. I.N. Beratha. Teknologi Desa. Galia Indonesia  
Jakarta, Tahun 1984. halaman 22.

cukup tinggi.

4. Sifat keterbukaan masyarakat desa terutama untuk menerima ide - ide baru, berupa pemanfaatan waktu secara efisien, dibidang produksi, dan pemilihan alternatif yang paling menguntungkan dibidang usaha pertanian; rata-rata masih perlu mendapat penanganan.
5. Rasa tidak suka menonjolkan diri ( sifat konform ) kita dapati masih cukup besar pada masyarakat desa. Dan mereka masih selalu berorientasi pada pimpinan mereka.

Ciri - ciri tersebut penting artinya dalam rangka mengawali suatu proses pembangunan masyarakat desa. Membangun masyarakat desa berarti memberikan perubahan terhadap ciri-ciri tersebut diatas. Diantaranya yang terpenting adalah rendahnya pendapatan masyarakat desa. Untuk kepentingan pembangunan perlu dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, diantaranya sebagai berikut;

1. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat, yaitu 2,4% pertahun.

Disamping itu dipedesaan pelayanan kesehatan semakin baik, hal ini menyebabkan<sup>(4)</sup> kesempatan untuk hidup semakin panjang. jumlah golongan anak muda semakin membengkak. Angkatan kerja yang produktif semakin sedikit perbandinganya dengan angkatan muda. Mereka harus memikul beban yang lebih besar untuk menjamin kehidupan golongan muda di pedesaan. Kebutuhan mereka lebih besar terutama untuk biaya pendidikan dan kebutuhan lain.

Disamping itu akibat dari cepatnya pertumbuhan penduduk adalah daya tampung sekolah menjadi terbatas, sehingga mereka yang

---

(4). Philip H. Combs. & Manzoor Ahmed. Memerangi kemiskinan Di Pedesaan Melalui pendidikan Non Formal. Cv. Rajawali. Jakarta 1984



tidak dapat bersekolah, terpaksa atau tidak harus hidup di dalam alam kebodohan. Bagi mereka yang menjadi korban masalah ini tidak dapat berbuat lebih banyak meningkatkan usahanya untuk menambah pendapatan mereka.

2. Salah satu hal yang selalu harus diperhatikan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini ialah relevansi serta pencetakan hasil pendidikan dengan kebutuhan tenaga yang diharapkan. Lebih-lebih lagi bagi negara kita yang sedang membangun, sangat teresa akan kebutuhan tenaga yang betul-betul mampu untuk pekerjaan tertentu. Walaupun usaha telah dilakukan dengan menambah jumlah sekolah, sehingga seluruh anak usia belajar diharapkan dapat tertampung di dalamnya, namun bagaimanapun dengan out-put yang dihasilkan. Ternyata yang timbul sejumlah pengangguran, disamping pengangguran yang belum sempat mengecap bangku sekolah, namun juga sejumlah penganggur akibat gagal sekolah dan bahkan pengangguran yang berpredikat pe-pelajar.

Kejadian demikian menunjukkan bahwa penambahan jumlah sekolah disamping belum dapat menampung seluruh jumlah anak usia sekolah, juga belum sanggup menyediakan tenaga kerja secara keseluruhan dan dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Karena ternyata para lulusan sekolah tersebut hanya dapat untuk bidang-bidang yang memang kebetulan ada dan terbatas jumlahnya, namun dia tidak sanggup bekerja dibidang skill tertentu yang masih lowong.

Disini timbul kesan yang pada umumnya sudah diketahui bahwa sistim persekolahan kita terutama kurikulum pendidikan belum lagi dapat menjawab seluruh tenaga yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Tidak jarang Menteri Tenaga Kerja<sup>(5)</sup> menyatakan bahwa; meningkatnya pengangguran bukan hanya disebabkan keterbatasan lapangan kerja, akan tetapi juga disebabkan kesenjangan antara kemampuan yang dibekalkan pada siswa dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja, baik ditinjau dari segi mutu maupun dari segi jumlah dan jenis lapangan kerja. Hal ini tidak jarang menimbulkan persoalan dibidang sosial ekonomi bagi pemuda didaerah pedesaan. Sehabis mereka memperoleh pendidikan di sekolah menengah harus kembali ke kampung halamannya, mereka tidak mampu berbuat apa-apa, membantu orang tuanya sekalipun. Dengan kesimpulan bahwa semua angkatan kerja muda yang tidak produktif dipedesaan tidak banyak mengenal lingkungannya, terutama dalam rangka memanfaatkan potensi alamnya.

3. Dengan kemajuan yang ada keadaan pedesaan saat ini mengalami banyak perubahan, sekolah-sekolah didirikan, jalan-jalan diadakan dan diperbaiki, komunikasi semakin lancar dan sebagainya. Pedesaan mulai tergugah dengan keterpencilanya atau isolemenya, desa mulai menampilkan dinamisasi, bergerak meninggalkan identitasnya yang asli. Sayang dalam proses itu berjalan tidak tanpa derita, sebab ternyata masyarakat pedesaan merupakan pihak yang lemah sebagai akibat proses yang lebih mementingkan persaingan dan keunggulan, mereka bukan semakin baik kehidupannya melainkan justru di eksploitasi oleh pesona suasana kota.

Berarti jurang perbedaan kehidupan yang cukup menyolok antara desa dan kota. Mereka yang merasa kebutuhanya dapat terpenuhi di kota mencoba untuk mendapatkannya atau mengadakan urbanisasi.

---

(5). Interaksi. Nomor 3. Tahun I. 1984. Halaman 9.

Di pedesaan timbul problema tersendiri. Biasanya yang mau lari ke kota adalah mereka yang mempunyai keberanian dan daya fikir yang relatif lebih baik, pedesaan semakin kekurangan tenaga - tenaga yang sangat dibutuhkan, produksi pedesaan semakin berkurang. (6)

4. Adanya nilai-budaya lokal dari suatu masyarakat desa yang kadang - kadang justru menghambat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya status simbol<sup>(7)</sup> yaitu masih dilaksanakan upacara-upacara perkawinan dan selamatannya yang berlebihan. Dalam menilai suatu kegiatan selalu berorientasikan kepada kebiasaan dan tradisi setempat, dan belum mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan tersebut. Misalnya selesai melaksanakan panen hasilnya dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Sehingga tidak sering terfikirkan oleh mereka untuk menggunakannya kembali sebagai modal berusaha berikutnya.

Jadi tidak ada pilihan lain, bahwa permasalahan tersebut cepat atau lambat harus ditanggulangi, karena kita ingin maju, ingin selalu mengadakan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik dan lebih nyaman. Bagaimana ikhtiar yang harus dilakukan agar pendapatan perkapita dapat meningkat. Sehingga kehidupan mereka lebih baik dan layak. Bagaimana cara-cara pemanfaatan sumber-daya yang ada, baik untuk sektor pertanian atau / dan untuk sektor diluar bidang pertanian, maka jawabannya dengan berbagai alasan akan lebih banyak mengacu pada penerapan gagasan dan ide-ide baru melalui proses pendidikan.

---

(6). Drs. H. Siagian. Pokok Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Alumni. Bandung Tahun 1983. Halaman 6.

(7). Drs. Yusmar Jamaran. Pengaruh Status Simbol Terhadap Sikap Kewiraswastaan. Paper. Tahun 1984.

## PENDIDIKAN SEBAGAI ALTERNATIF

Bagaimanapun, tantangan terberat yang dihadapi negara Indonesia dalam pembangunan dewasa ini bagaimana menjangkau dan secara efektif dapat meningkatkan pendapatan 55 juta rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan, <sup>(8)</sup> dalam keadaan perekonomian negara kita yang masih dilanda resesi dunia yang berkepanjangan dewasa ini. Upaya menjangkau dan meningkatkan taraf hidup lapisan masyarakat berpenghasilan rendah ini bukan saja merupakan tugas atau kewajiban pemerintah secara konstitusional dan fungsi pembangunan yang mendesak, akan tetapi secara kemanusiaan yang beriman kepada Allah adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Mereka itu adalah orang yang disebut dengan kaum mustadh'afin, mereka itu akan dapat terangkat keatas apa bila hartawan dan ulil al-bab dengan bermurah hati mengulurkan tangan kepada mereka.

Membela mustadh'afin berarti melanjutkan tugas Rasul dalam (dikutip Al-Quran) - membuang beban-beban (penderitaan) dan belenggu - belenggu yang ada pada mereka. Dalam operasionalnya juga Rasul juga berkata <sup>pada</sup> sahabatnya; " cintailah orang miskin dan akrabliah dengan mereka, supaya Allah pun akrab dengan engkau pada hari kiamat." Segala sesuatu ada kuncinya, baik kunci surga maupun kunci mencapai masyarakat adil dan makmur, dan kuncinya adalah mencintai dan mengasihi orang-orang miskin.

Secara konstitusional telah ditetapkan didalam GBHN yang berdasarkan sidang umum MPR bulan Maret 1983, bahwa; Dalam pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki penghasilan kelompok-kelompok masyarakat

---

(8). Emil Salim. Perencanaan Pembangunan Dan Pemerataan Pehdapatan. Yayasan Idayu. Jakarta. Tahun 1982.

yang mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah, seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak memiliki tanah, petani yang memiliki tanah yang sangat sedikit, nelayan, pengrajin dan sebagainya, dalam rangka makin meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya. Demikian pula dilanjutkan program-program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan keahlian dan kemampuan serta memperluas pemasaran. (9)

Usaha menjangkau kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam kegiatan pembangunan masyarakat sungguh bukan merupakan tugas yang mudah. Mereka berada jauh dari pusat kota atau pusat pemerintahan, tersebar jauh di pedalaman, daerah pedesaan yang terletak di pulau-pulau kecil yang terpencil. Sebagian besar tidak terorganisir, mempunyai adat dan kebutuhan yang berlainan.

Usaha untuk meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat yang miskin merupakan suatu panggilan yang suci dan mulia bagi orang yang terdorong oleh sentuh hatinya iman. Nabi Muhammad saw. bersabda; " seorang muslim adalah suatu darah bagi setiap muslim lainnya, tidak dibenarkan bertindak zalim terhadap atau membiarkannya tertimpa bencana ( kemiskinan ). Usaha tersebut tidak mungkin efektif terlaksana hanya melalui aparat birokrasi pemerintah saja. Betapapun baiknya dan efesienya suatu aparat pemerintah, yang setiap birokrasi selau mengandung ciri dan keterbatasan. Yang mana dalam pelaksanaannya tidak selalu cocok untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kebutuhan pokok masyarakat pedesaan.

(9). Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Tentang GBHN.  
Bab III. D. 24.

Namun demikian kita sebagai kelompok ulil al-bab ( pemikir atau agent ) dengan hidayahNya dapat menempuh salah satu bentuk alternatif, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada mereka yang berisikan paket pengetahuan dan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keputusan yang kita ambil berdasarkan pada asumsi bahwa rendahnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan kemiskinan dan menjadikan orang-orang lebih sengsara sangat erat kaitannya dengan pengetahuan atau kearifan dan akal budi.<sup>(10)</sup>

Kita sepakat bahwa faktor produksi terpenting dalam pembangunan adalah manusianya, sebab manusia adalah sekaligus sebagai tujuan dan alat, subjek dan sekaligus objek dari pembangunan. Manusia yang miskin akal budinya akan miskin ( rendah ) pula produktifitasnya.<sup>(11)</sup> Penanaman atau timbulnya akal-budi sebagian besar berasal atau diakibatkan oleh atau lewat pendidikan. Sehingga kita akan memperoleh kesimpulan bahwa dari semua sumberdaya, pendidikan adalah atau seharusnya menjadi kunci<sup>(12)</sup> untuk segala-galanya, termasuk usaha meningkatkan produktivitas masyarakat pedesaan. Sebab melalui pendidikan dapat ditransfer nilai-nilai baru, ide-ide baru, cara-cara baru yang memungkinkan manusia melihat dan menyadari serta memperluas cakrawala kehidupan, sehingga mendorong seseorang untuk mencapainya.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan ( produktifitas ) masyarakat desa, taraf pertama yang perlu dilakukan adalah me -

(10). Baca Dr. Nurtain. Memerani Kemiskinan Melalui Pendidikan Non-Formal. Paper. IKIP Bandung. Tahun 1979.

(11). Baca Drs. M. Sinungan. Produktivitas Apa Dan Bagaimana. Aksara Persada Pers. Jakarta. Cetakan I. Tidak bertahun.

(12). Lihat juga E.F. Schumacher. Kecil Itu Indah. LP3ES. Jakarta. Tahun 1979.

nambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilanya tentang usaha-usaha yang mereka kerjakan sebagai mata pencahariannya. Disini jelas yang harus dilakukan adalah mendidik mereka dengan berbagai cara. Hal ini mengandung arti bahwa makin tinggi taraf pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula produktifitasnya.

#### Pendidikan Non- Formal Sebagai Alternatif.

Didalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa; Pendidikan berlansung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ( GBHN 1983)

Maka dalam hal ini pendidikan adalah merupakan proses yang menyentuh seluruh anggota masyarakat. Untuk itu pemerintah menempuh jalur prioritas dalam pengembangan pendidikan, yaitu pemerataan untuk memperoleh dan pemerataan peningkatan mutu pendidikan. Pilihan ini didasarkan atas pemikiran bahwa disamping memperoleh pendidikan adalah merupakan kebutuhan dan hak setiap anggota masyarakat, juga pendidikan yang merata dan bermutu akan dapat meningkatkan kemampuan berfikir mereka. Kemampuan berfikir yang tinggi dari anggota masyarakat akan tinggi pula kemampuan mereka dalam berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuranya.

Pelaksanaan pendidikan nasional dalam mencapai tujuan prioritas tersebut diatas, maka diberikanlah kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan melalui cara atau sistim persekolahan ( formal ), secara informal dan melalui sistim luar sekolah ( non-formal ).

Bentuk pendidikan yang terakhir diatas, pada hakeketnya adalah kelengkapan dari pendidikan formal dalam kerangka pengembangan sumber sumber manusia untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta keterampilan seluruh masyarakat dengan tujuan mempertinggi partisipasi serta produktivitas masyarakat bagi pembangunan disemua sektor dan berlangsung seumur hidup. Sasaran pendidikan ini bukan saja masyarakat di kota, akan tetapi lebih diutamakan bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal dapat disusun dalam bentuk program-program tertentu, tetapi juga dapat dilaksanakan secara bebas oleh setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, seperti kejar paket A dan kejar usaha.

Sebenarnya bentuk pendidikan non-formal ini sudah lama adanya di tengah-tengah masyarakat, namun secara resmi dicanangkan pada rapat unesco di Perancis pada tahun 1970. Pelaksanaan pendidikan non-formal pada tiap negara atau daerah sangat berlainan bentuknya. Hal ini disebabkan oleh berbagai situasi dan kondisi. Gerakan kearah pendidikan non-formal karena dirangsang oleh bermacam-macam kondisi.<sup>(13)</sup> Diantara kondisi-kondisi tersebut antara lain:

1. Karena persekolahan dianggap kurang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang baik aspek kuantitas maupun aspek kualitasnya.
2. Karena banyaknya warga masyarakat yang terlantar pendidikan formalnya ( drop out atau tidak tertampung ), pada hal kalau dilatih kembali akan bisa menjadi tenaga kerja yang lebih produktif dan menjadi warga yang lebih baik.

---

(13). Drs. Sanapiah Faisal. Sosiologi Pendidikan. Usaha Nasional. Surabaya. Tidak bertahun. Halaman 151.



3. Karena persekolahan sudah kebanyakan fungsinya yang ditanganinya ketimbang apa yang sungguh bisa dikerjakan.
4. Karena birokrasi persekolahan yang berskala luas, seringkali membuat nya tidak responsif ( tanggap ) terhadap kepentingan-kepentingan serta aspirasi masyarakat dilingkungannya.
5. Karena setiap anggota masyarakat dituntut untuk selalu selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dibidang sosial-ekonomi.

Dewas ini pendidikan non-formal semakin beragam, baik dalam jenis program, sasaran didiknya atau kebutuhan atau sumber belajarnya. Disamping itu juga sudah semakin luas linkupannya seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, fungsinya juga semakin luas, terutama terutama terletak pada keterencanaannya diberbagai sektor kehidupan.

Untuk lebih mudah mengenal pendidikan non-formal ini ada baiknya dikethui terlebih dahulu ciri-ciri yang melekat pada pendidikan ini. Secara umum ciri-cirinya dapat dilihat dari segi-segi berikut:

1. Pendidikan berlansung secara sukarela atas dasar aktifitas sendiri, namun demikian dapat dilaksanakan secara berkelompok.
2. Sumber pendidikan tidak terikat pada guru, tetapi sumber-sumber belajar dapat dipilih sendiri.
3. Penyelesaian target atau program berdasarkan self pacing.
4. Waktu dan tempat dapat dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

Sejalan dengan uraian diatas, pendidikan non-formal yang bergerak diluar sistem persekolahan biasa harus mempertegas hubungan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan pedesaan, yang sangat perlu memperhatikan sumber daya yang masih potensial baik dalam hubungannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat maupun dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan.

## KELOMPOK BELAJAR USAHA

Mengingat sifat pendidikan non-formal yang serba sederhana ini, tampak mudah dilaksanakan serta dengan biaya yang relatif rendah. Namun bagaimanapun juga untuk mencapai hasil yang baik sudah tentu diperlukan perencanaan yang matang serta berhati-hati dalam mempersiapkannya. Kelompok belajar usaha<sup>(14)</sup> merupakan salah satu bentuk sistem pelaksanaan dari pendidikan non-formal, dalam merumuskan atau menyusun perencanaannya harus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa, misalnya desa pertanian atau desa nelayan. Melalui kelompok belajar usaha ( disingkat; Kejar Usaha ) ditumbuhkan dan dikembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap berusaha dari warga belajar sehingga mereka memiliki mata pencaharian sebagai sumber penghasilan. Disamping itu juga diusahakan agar mereka mau berusaha secara berkelompok, demikian pula Kejar Usaha diharapkan akan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan mata pencaharian masyarakat disekitarnya.

Agar kegiatan Kejar Usa tersebut diatas benar-benar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berusaha secara berkelompok, maka dapat dipakai acuan umum sehingga dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan bentuk-bentuk dan letak serta sumber - daya pedesaan.

### 1. Sistem pelaksanaan-

Kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal yang dilaksanakan melalui Kejar Usaha baik yang bergerak di sektor pertanian maupun disektor lain secara kecil-kecilan diluar bidang pertanian, adalah dengan menggabungkan antara proses belajar dan bekerja. Dalam pro-

---

( 14 ). Bagi yang berminat untuk melaksanakan program - program pendidikan non-formal dapat melihat lampiran tentang petunjuk teknis pelaksanaan program Kejar Usaha di akhir tulisan ini.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

U1  
374  
JAE  
M1

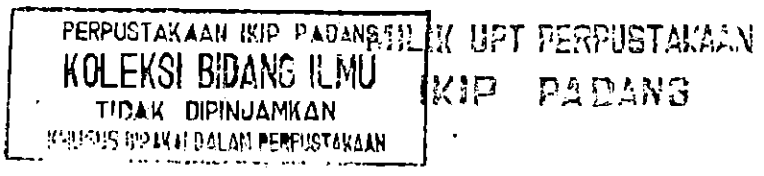
ses belajar warga belajar tidak hanya belajar tentang teori saja dari pusat dan sumber belajar<sup>(15)</sup> tentang suatu usaha, akan tetapi harus di sertai dengan langsung bekerja ( sesuai dengan tuntutan suatu usaha ).

Agar mendapatkan efektifitas proses belajar dilaksanakan dengan sistem kelompok, yang disebut dengan kelompok belajar atau Kejar Sistem Kejar ini dimana anggota masyarakat ( warga belajar ) menghimpunkan diri dalam kelompok belajar yang bersedia saling belajar. Bagi anggota yang memiliki keterampilan tertentu berperan menjadi pusat dan sumber belajar anggota, sehingga dengan sistem kelompok ini keterampilan atau usaha yang telah dimiliki salah seorang anggota kejar dapat dikembangkan secara bersama-sama baik segi kuantitatif maupun kualitas usaha tersebut. Dengan demikian secara implikasinya Kejar memberikan juga pengertian sebagai kegiatan ( proses ) belajar.

Mungkin pada suatu kelompok tidak mempunyai sumber belajar karena mereka sama-sama tidak bisa, tetapi yang penting ada hasrat untuk mau belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sekaligus meningkatkan produktifitasnya, secara bersama-sama dapat mendatangkan orang lain dari luar sebagai sumber. Pada orang itulah anggota Kejar mendapatkan suatu keterampilan untuk memulai semacam usaha baru, dengan belajar membuat telur asin misalnya.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kelompok belajar bukan suatu organisasi yang berdiri sendiri, tetapi menjadi tulang punggung organisasi yang baik. Dengan kata lain, bahwa mereka yang berada dalam kelompok belajar adalah sebenarnya kaderisasi organisasi.

(15). Dapat baca Zainuddin HR Lenggang. Pusat Sumber Belajar Perpustakaan Sebuah Kompleksi. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta. Tahun 1983.



Bila sudah tiba waktunya, dalam arti bahwa apabila kelompok belajar sudah menghasilkan dengan baik dapat dibentuk suatu organisasi yang hidup dan kuat dibidang ekonomi, misalnya k o p e r a s i.

Untuk lebih berhasil suatu kejar usaha melaksanakan kegiatannya, maka beberapa pesyaratan yang harus dipenuhi untuk satu kelompok antara lain:

- a. Kelompok ( Kejar Usaha ) tidak berjiwa politis dan terbuka bagi semua anggota masyarakat tanpa membedakan golongan, pihak-pihak tertentu yang bersifat diskriminasi, yang di utamakan adalah ke mauan bekerja dan mau belajar berkelompok.
- b. Jumlah anggota kelompok belajar harus dibatasi dalam arti jumlahnya. .Sebaiknya di usahakan jumlah anggota kelompok tidak terlalu besar, yaitu berkisar antara 6 - 10 orang. Dengan jumlah anggota kelompok yang relatif kecil diharapkan semua mereka dapat aktif dan terkontrol.
- c. Anggota kelompok belajar benar-benar merupakan inti dari suatu bidang usaha di desa. Sehingga berhasilnya kelompok belajar melaksanakan satu bidang usaha ( menurut pilihan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki ) misalnya membuat batu merah ( batu - tembok ) atau kerajinan dari rotan; memberikan dampak yang positif kepada anggota masyarakat desa yang lain.

Oleh karena berbagai kelompok yang bermunculan yang menangani usaha-usaha yang mungkin dilaksanakan harus dikoordinir dalam suatu wadah, apakah didalam wadah LKMD atau koperasi unit desa.

## 2. Program Pendidikan.

### 2.1 Prioritas Program

Pendidikan non formal terbentang luas, meliputi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat pedesaan. Mengingat luasnya bidang yang dapat digarap dengan pendidikan non-formal melalui sistem kejar usaha, perlu sangat diadakan pendiagnosaan kebutuhan belajar secara cermat, dengan jalan ini dapat ditentukan sektor mana yang utama sekali untuk diindahkan dan sektor mana pula yang akan diabaikan. Karena tidak akan mungkin akan lebih efektif apabila di suatu desa terlalu banyak jenis dan bentuk program yang dilaksanakan. Barangkali tanpa penuh ketelitian dan terlalu ceroboh mengambil keputusan tentang program yang akan dilaksanakan akan menyebabkan usaha yang akan dilaksanakan lebih banyak sia-sianya dibandingkan dengan hasil bakal diharapkan. Untuk itu perlu semacam analisa bersama antara agen pembawa ide sebagai konsultan dengan tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat yang akan banyak berperan dalam pelaksanaan kegiatan sebelum program disusun.

Namun untuk sementara kita berpegang pada suatu asumsi bahwa program pendidikan non-formal jika ditinjau dari segi isi akan lebih diminati dan bermanfaat bagi masyarakat desa pada program pendidikan non-formal yang langsung menyangkut soal lapangan kerja dan peningkatan produktifitas (pendapatan)<sup>(16)</sup> masyarakat di daerah pedesaan. Karena mayoritas kehidupan masyarakat desa berada di sektor pertanian, sangat cocok sekali program yang dilaksanakan seperti bercocok tanam, perikanan dan peternakan serpengolahan bahan makanan. Dengan demikian harus kita sepakati

(16). Lihat juga Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed. *Memerangi kemiskinan Di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*. CV. Rajawali. Jakarta. Tahun 1984.

bahwa terpaksa atau tidak akan diabaikan bidang lain yang juga dianggap penting, misalnya pembinaan melek huruf, kesehatan, ilmu gizi dan kegiatan pengembangan masyarakat lainnya. Namun demikian bagi agen harus selalu waspada terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang mungkin harus dilaksanakan sebagai pelengkap dan penunjang program yang sedang dijalankan.

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan kasus daerah pedesaan di Sumatera Barat. Pada waktu ini pembagian pendapatan di daerah Sumatera Barat termasuk baik dalam arti lebih merata bila dibandingkan dengan daerah lainya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang membantunya, disamping peran dari kemajuan pendidikan dan juga tingkat keterampilan rata-rata dari penduduknya yang ikut menentukan. Maka oleh karena itu usaha-usaha dalam menghilangkan penyakit tiga buta dan peningkatan produktifitas sangat penting, dan perlu mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam usaha memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada golongan masyarakat yang sekarang ini masih dihinggapi penyakit tiga buta ( aksara latin, pengetahuan dasar dan Bahasa Indonesia ). Jumlah Penduduk Sumatera Barat yang menderita tiga buta itu ialah sebagai berikut ( keadaan 1979 )<sup>(17)</sup>:

Wanita	:	186.702	orang
Pria	:	140.159	orang
<hr/>			
Jumlah	:	326.861	orang

Jumlah tersebut meliputi penduduk yang berumur 10 - 45 tahun.

---

(17). DR. Priyitno. "Beberapa catatan Tentang Kemungkinan Usaha Pemberantasan Tiga Buta Di Sumatera Barat." Forum Pendidikan. No.3.4 Tahun VIII. September, Desember 1982. IKIP Padang.

TABEL I  
LAPANGAN PEKERJAAN MASYARAKAT DESA

No.	Lapangan Pekerjaan	Jumlah penduduk 10 tahun keatas	%	Keterangan
1.	Pertanian (dalam arti luas)	25.653.435	69,39	Jumlah penduduk yang tidak bekerja ( umur 10 tahun ke atas): 4.850.898 orang
2.	Pertambangan (dalam arti luas)	192.344	0,52	
3.	Industri	2.333.041	6,31	
4.	Listrik	54.059	0,21	
5.	Bangunan	815.235	2,21	
6.	Perdagangan	3.597.767	9,73	
7.	Angkutan	644.972	1,74	
8.	Keuangan Asuransi Persewaan bangunan	56.732	0,15	
9.	Jasa	3.591.132	9,71	
10.	Lain-lain	38.926	0,11	
X	Jumlah	36.967.634	100,00	

S u m b e r : Biro Pusat Statistik; Hasil Sub Sempel Sensus Penduduk 1980. Jakarta Indonesia. Halaman 119.



Sungguhpun demikian ada hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama Tidak mungkin memandang pengaruh tiga buta dengan menyama-ratakan saja terhadap semua penderita tiga buta tersebut. Kedua, di Sumatera Barat kemampuan berbahasa Indonesia bukan merupakan problema yang besar, karena Bahasa Minang tidak begitu terlalu jauh berbeda dengan Bahasa Indonesia. Disamping itu kebutuhan akan pengetahuan dasar dapat ditempuh dengan melalui cara-cara yang relatif lebih mudah<sup>(18)</sup> dibandingkan dengan melalui Kejar Paket A. Oleh sebab itu, barangkali akan lebih bijaksana kalau program pendidikan non-formal untuk masyarakat pedesaan Sumatera Barat sebagai prioritasnya adalah program yang betul-betul sangat mendesak, yaitu yang dapat langsung meningkatkan pendapatan mereka (petani).

Kemudian lihat Tabel I. Pada Tabel dapat dilihat hanya beberapa sektor saja yang benar-benar merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa, yakni sektor pertanian 69,39%, Sektor Perdagangan 9,73%, Sektor Jasa 9,71%, Sektor Industri 6,31%, Sektor Bangunan 2,21%, Sektor angkutan 1,74 %, sedangkan di sektor lain berada di bawah 1%. Dari Tabel I juga memperlihatkan secara jelas tentang jenis lapangan pekerjaan masyarakat desa secara terperinci. Dari data tersebut nampak bahwa sektor pertanian masih dominan sebagai lapangan pekerjaan pokok masyarakat. Disamping itu petani di pedesaan masih merupakan petani subsistence dalam arti bahwa mereka berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau kebutuhan primer saja.

---

(18). Misalnya melui siaran berita TV RI, siaran pedesaan, sarasehan ngobrol di warung atau diladang, didalam pertemuan-pertemuan PKK, wirid-wirid dan penyuluhan-penyuluhan dari berbagai dinas dan instansi pemerintah.

## 2.2 Isi Program

Untuk merancang satu program Kejar Usaha, yang sangat penting mengawali pemikiran kita adalah pengkajian tentang potensi atau sumberdaya yang akan dijadikan sumber-belajar dipedesaan. Berhasil atau tidaknya suatu paket program sangat banyak ditentukan oleh sumber daya yang ada, karena sumberdaya inilah yang akan menentukan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Kejar.

Sumber daya yang ada di pedesaan dapat dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan warga belajar. Pada dasarnya di desa tidak jarang kita jumpai tanah merah yang sangat gersan dan sulit berbagai tanaman untuk tumbuh subur, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan jalan terlebih dahulu dijadikan batu bata ( batu tembok ). Sedangkan pada daerah lain tanahnya sangat subur, dan cocok untuk tanaman kedele tau palawija lainnya.

Menurut Combs dan Ahmed kebutuhan belajar masyarakat dapat di bagi dua kelompok atau dua bidang garapan, pertama keterampilan dibidang pertanian dan kedua keterampilan di luar bidang pertanian. Namun demikian, dengan memperhatikan bentuk dan potensi daerah pedesaan maka tidak kedua bidang program tersebut bisa dijalankan dengan baik pada satu desa. Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dibidang pertanian , maka dapat dilaksanakan program Kejar Usaha yang meliputi program hulu dan pasca panen . Yang dimaksud dengan program hulu misalnya bercocok tanam, bertanam palawija, perikanan ( kolam ikan, tambak udang, dll) dan peternakan, sedangkan yang dimaksud dengan pasca panen di bidang per

tanian adalah usaha-usaha mengolah hasil-hasil dari program hulu, misalnya membuat gaplek atau kue-kue dari ubi kaya, membuat sirop dan lain sebagainya. Kedua program tersebut harus didampingi oleh program lain yaitu di bidang pemasaran hasil-hasil ( perdagangan ).

Kalau sektor di luar bidang pertanian biasanya kurang menguntungkan bagi masyarakat pedesaan, misalnya montir radia, las, membuat tas dan sepatu. Semua bentuk keterampilan yang terakhir ini barang kali akan lebih cocok untuk isi program Kejar Usaha di daerah perkotaan. Namun demikian bukan berarti tidak ada kebutuhan belajar di luar bidang pertanian yang dapat di kembangkan di daerah pedesaan, akan tetapi hanya berada dalam kemungkinan yang relatif kecil. Salah satu pertimbangan untuk tidak mungkin di kembangkan keterampilan diluar bidang pertanian di daerah pedesaan adalah penyediaan bahan baku, pemasaran dan langganan, serta dapat dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Diantara isi program-program yang mungkin bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Hulu

- Kejar Usaha bercocok tanam, seperti kedele, kacang hijau, jahe dan sayur-sauran lainnya.
- Kejar Usaha peternakan, seperti ayam, puyuh, kelinci dan belut
- Kejar Usaha perkebunan, seperti kasia vera, kopi dan buah-buahan ( rambutan, nenas, pisang, mangga, duku dll.)
- Kejar Usaha perikanan, misalnya ikan laut, ikan air deras,

kolam ikan dan tambak udang.

b. Program Pasca Panen.

Dengan memperhatikan sumber daya ( hasil-hasil ) yang telah di usahakan pada tingkat program hulu sangat erat kaitanya dengan usaha penggalan potensi maksimal ( Value added ). Dengan mengolah hasil-hasil yang telah dicapai pada program hulu akan memberikan kesempatan dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Sehingga nantinya menjadikan sistem perekonomian masyarakat desa lebih terarah dan penerimaan masyarakat akan bertambah.

Karena struktur perekonomian di bidang produksi primer sangat erat kaitanya dengan pengembangan sektor-sektor mata - pencaharian yang lain, lebih-lebi dalam usaha meningkatkan penerimaan ( pendapatan ) dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa, maka perlu di kembangkan berbagai usaha di sektor pengolahan hasil-hasil pertanian yang ada di desa tersebut.

Bentuk-bentuk program Kejar Usaha yang mengolah hasil pertanian, disamping di tentukan oleh hasil-hasil yang ada di desa bersangkutan juga oleh kemampuan anggota masyarakat ( warga belajar ) menguasai teknologi sederhana. Agar dapat mencapai nilai tambah yang lebih baik, perlu penerapan teknologi tepat guna. Untuk itu diusahakan pemilihan teknologi yang mungkin dapat di terapkan di desa disamping teknologi yang telah ada ( tradisional ).

Program-program pengolahan hasil-hasil pertanian dengan

menggunakan teknologi sederhana yang mungkin bisa dilaksanakan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Pembuatan Tempe
- Pembuatan Tahu
- Pembuatan Gula ( aren, tebu, kelapa )
- Membuat minyak Kelapa
- Membuat slai pisang
- Membuat Bubuk kopi
- Mengolah singkong ( gaplek, kerupuk dan aneka masakan )
- Mengusahakan aneka kerajinan dari ( Rotan, Ijuk, Daun pandan dan Bambu )

Dengan koordinasi yang baik kelompok-kelompok atau Kejar Uasha akan memperoleh hasil tambahan, dengan sendirinya pendapatan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.

#### c. Pemasaran.

Salah satu fakto terpenting dalam bidang ekonomi adalah masalah distribusi ( pemasaran ) dari hasil produksi yang telah dicapai. Pemasaran yang baik akan memberikan prospek yang cerah dari setiap kegiatan produksi.

Untuk memudahkan anggota masyarakat ( warga belajar) perlu memunculkan suatu sistem pemasaran yang baik. Diharapkan sistem tersebut dapat menghimpun semua Kejar Usaha yang ada di suatu desa dan tidak merugikan akan tetapi dapat mempermudah atau menunjang kelancaran setiap kegiatan Kejar.

Dalam kegiatan pemasaran hasil-hasil yang di produksi oleh Kejar dapat di lakukan melalui sistem perorangan atau de

ngan sistem kelompok. Pada sistem pertama atau secara perorangan ( termasuk pengertian satu Kejar Usaha ) secara bebas dapat saja memasarkan hasil-hasil usahanya, baik yang disalurkan melalui seorang pedagang atau menjual sendiri pada warung yang mereka miliki. Sedangkan dengan menggunakan sistem kedua, yaitu sistem kelompok ( koperasi ) dimana seluruh anggota ( Kejar ) menghimpunkan diri, kemudian melalui pengurus tersendiri memasarkan setiap hasil-hasil usaha mereka. Sistem koperasi ini di samping dapat mengatasi persaingan diantara kelompok Kejar juga bercirikan ekonomi Indonesia. Maka wadah (Koperasi) inilah yang melaksanakan penjualan kepada konsumen baik didalam atau di luar desa bersangkutan.

### 3, Sasaran Pendidikan ( Warga Belajar )

Peranan Pendidikan Non-formal dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi terutama meningkatkan pendapatan masyarakat, berdasar pengalaman nyata dilapangan tidak diragukan lagi. Bahkan dewasa ini pendidikan non formal kehadirannya ditengah-tengah masyarakat dengan misi yang lebih sempurna merupakan angin segar dalam proses pembangunan masyarakat dengan berpedoman pada berbagai keberhasilan di beberapa negara di dunia dan beberapa daerah di Indonesia.

Pendidikan non-formal yang berhasil dapat menjawab persoalan anggota masyarakat pedesaan. Perlu kita sadari bahwa mereka yang berada di pedesaan serba berkekurangan jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tinggal di kota. Mengingat pendidikan non-formal ini tidak memberikan pembatasan yang tegas dan jelas dan didasarkan atas kemauan dan kesadaran sendiri dari warga Belajar

maka sasaran didik ( warga atau anggota Kejar Usaha ) tidak terbatas pada kelompok umur tertentu atau tingkat pendapatan tertentu. Namun demikian secara umum dapat ditetapkan adalah orang-orang yang berumur antara 10 - 45 tahun dan yang diutamakan mereka yang berpenghasilan rendah. Program Kejar Usaha ini juga terbuka untuk belajar baik bagi perempuan ataupun laki-laki. Bukan pula berarti wanita sama wanita sekelompok dan laki-laki sama laki-laki pula, akan tetapi dapat disesuaikan dengan keadaan. Kadang kala dalam Kejar Usaha ada pekerjaan yang mengharuskan wanita mengerjakannya dan kadang kala harus laki-laki yang menanganinya. Yang penting asal saja mereka mau untuk belajar berusaha setara bersama-sama.

Salah satu persyaratan yang sangat penting dari peserta Kejar ( warga belajar ) adalah senantiasa memiliki kejakinan bahwa kekurangan dirinya adalah merupakan kelebihan bagi orang lain, yang bersedia untuk dipelajari. Sedangkan kelebihannya adalah merupakan kekurangan bagi orang lain, yang harus diberikan tanpa diminta dan penuh kesadaran. Dengan kata lain seorang warga belajar di suatu saat menjadi saran didik, sedangkan di waktu yang lain mungkin menjadi sumber belajar.

## P E N U T U P

### 1. Kesimpulan.

Randahnya kemampuan berproduksi di bidang pertanian akan menurun pula kemampuan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja yang terus menerus melimpah, dan menyebabkan tingginya jumlah angkatan kerja setengah menganggur dan pengangguran tersembunyi di pedesaan. Akibatnya adalah masyarakat pedesaan tetap miskin. Kemiskinan yang terujud bukan saja kemiskinan yang dianut oleh individu, akan tetapi akan meliputi kemiskinan yang bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat. Kemiskinan struktural di sebabkan oleh oleh karena keadaan ( struktur sosial ekonomi ) yang ada dan tidak mungkin bagi mereka menaikan taraf kehidupan mereka, diataranya cara berfikir dan berusaha mereka di bidang ekonomi.

Bagi mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak atau kurang produktif di pedesaan, tiada pilihan lain untuk pencapaian keadaan bekerja untuk berproduksi yang lebih tinggi, melainkan membelajarkan diri berusaha, yaitu dengan menempuh sistem pendidikan non-formal, yang direalisasikan dalam bentuk belajar dan berusaha. ( yang disebut dengan Kejar Usaha ).

### 2. Saran.

Betapapun indah dan bagusnya suatu rancangan paket program pendidikan non-formal terutama program Kejar Usaha, tidak akan berjalan dengan mulus tanpa harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut yang barangkali akan menjadi suatu hambatan yang sulit untuk dipecahkan, yaitu pemetaan daerah pelaksanaan program Kejar Usaha, baik pemetaan daerah yang



menyangkut dengan sumber daya yang ada maupun bentuk program Kejar Usaha yang dilaksanakan.

Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau antara satu daerah dengan daerah yang lain mempunyai Kejar Usaha yang sama programnya akan menimbulkan kesukaran dalam segi pemasaran.

Barang kali usaha pemetaan ini dapat dilakukan dalam skala daerah yang kecil atau daerah yang lebih luas. Tentu yang lebih berwenang dalam hal ini adalah pemerintah daerah bersama agen, misalnya Bapenas atau Bapeda.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Ath-Thawil. DR. Nabil Shubi. 1985. Kemiskinan Dan Keterbelakangan Di Negara - Negara Muslim. Mizan. Bandung.
2. Biro Pusat Statistik. 1982. Penduduk. Indonesia. Sensus Penduduk 1980. Jakarta.
3. Beratha. Drs. I.N. 1984. Teknologi Desa. Galia Indonesia. Jakarta.
4. Combs. Philip.H. Dan Manzoor Ahmed. 1984. Memerangi Kemiskinan Di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal. CV. Rajawali. Jakarta.
5. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1987. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Dan Olah Raga. Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Dan Masyarakat. Jakarta.
6. Faisal. Drs. Sanapiah. 19 ? . Sosiologi Pendidikan. Usaha Nasional. Jakarta.
7. Hasan. A. 1978. Al-Furqan. Tafsir Quran. Dewan Da'wah Islamiah Indonesia. Jakarta.
8. Interaksi. Majalah. Nomor 3 Tahun 1984. Jakarta.
9. Jamaran. Drs. Yusmar. 1984. Pengaruh Status Simbol Terhadap Sikap Kewiraswastaan. Paper.
10. Iskandar. Anwar. 19 ? . Suara Pendidikan Masyarakat. Proyek Pengembangan Pendidikan Masyarakat. Jakarta.
11. Ketetapan MPR. No. II / MPR / 1983. Tentang G B H N . 1986. Jakarta.
12. Lenggang. Drs. Zainuddin. H R. 1983. Pusat Sumber Belajar, Perpustakaan Sebuah Komplikasi. Proyek Pengembangan Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta.

13. Marbun. B. N. 1984. Proses Pembangunan Desa. Erlangga. Jakarta.
  14. Mappa. Syamsu. 1984. Prosedur Pengembangan Program Kegiatan Belajar Dan Bahan Belajar Pendidikan Luar Sekolah. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta.
  15. Nurtain. DR. 1979. Memerangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Non Formal. Paper.
  16. Salim. Emil. 1982. Pemerataan Pembangunan Dan Pemerataan Pendapatan. Yayasan Idayu. Jakarta.
  17. Schumacher. E. F. 1979. Kecil Itu Indah. LP3ES. Jakarta.
  18. Siagian. Drs. H. 1983. Pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Alumni. Bandung.
  19. Sinungan. Drs. M. 19 ? Produktivitas Apa Dan Bagaimana. Cetakan I. Aksara Persada Pers. Jakarta.
- 

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Lampiran :

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KEJAR USAHA

### 1. P e n g e r t i a n

#### a. Program Kejar Usaha

Kejar usaha ialah suatu kegiatan membelajarkan warga masyarakat untuk mengejar ketinggalan di bidang usaha, dengan cara bekerja dan berusaha, guna memperoleh mata pencaharian sebagai sumber penghasilan yang layak.

Kejar usaha sebagai salah satu program Pendidikan Masyarakat yang sifatnya bukan murni perusahaan yang bertujuan semata-mata mencari keuntungan, tetapi perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan berusaha. Unsur bekerja, belajar, dan berusaha merupakan ciri khas yang harus menjiwai dan mewarnai suatu Kejar Usaha.

Melalui Kejar Usaha, ditumbuhkan dan kembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap berusaha dari warga belajar sehingga ia memiliki mata pencaharian sebagai sumber penghasilan, demikian pula Kejar Usaha akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mata pencaharian masyarakat di sekitarnya.

#### b. Pengembangan Kejar Usaha

Pengembangan Kejar Usaha adalah proses perluasan belajar dan berusaha, perbaikan dan peningkatan produksi serta penanekaragaman pemanfaatan hasil produksi Kejar Usaha yang telah ada, dan membuka usaha baru.

#### c. Pembina dan pembinaan Kejar Usaha

Pembina Kejar Usaha ialah para petugas Pendidikan Masyarakat, petugas instansi pemerintah lainnya dan organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Kejar Usaha, mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pembinaan Kejar Usaha adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan terus menerus yang berhubungan proses : perencanaan,

pengaturan, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan Kejar Usaha agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Para pembina dalam melakukan pembinaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh pemimpin unit kerja Pendidikan Masyarakat menurut jenjang pemerintahan. Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan. Pada tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh LKMD.

d. Penyelenggara Kejar Usaha.

Penyelenggara Kejar Usaha adalah lembaga/organisasi kemasyarakatan, seperti LKMD atau organisasi yang bergerak dalam pendidikan luar sekolah, yang melakukan akad kerja penyelenggaraan Kejar Usaha dengan Penilik Pendidikan Masyarakat.

e. Pelaksana Kejar Usaha.

Pelaksana Kejar Usaha adalah perorangan, kelompok atau lembaga/organisasi yang disertai tanggungjawab melaksanakan Kejar Usaha oleh pihak Penyelenggara, baik di tingkat Desa/Kelurahan atau di tingkat Kecamatan.

f. Dana Penyisihan.

Dana penyisihan ialah dana yang diperoleh dari sebagian keuntungan dana belajar usaha yang besar kecilnya ditentukan oleh besarnya dana belajar usaha yang digunakan maupun frekwensi waktu penyisihan yang telah ditetapkan.

## 2. T u j u a n.

Tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan Program Kejar Usaha:

a. Tujuan Umum.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap masyarakat agar mampu mengusahakan mata pencaharian sebagai sumber penghasilan serta sumber kesejahteraan hidupnya.

b. Tujuan Khusus.

Selama dan setelah mengikuti Program Kejar Usaha, warga belajar:

- 1) Dapat mengembangkan dana belajar usaha;

- 2) Dapat memasarkan hasil usaha;
- 3) Dapat mengelola administrasi usaha;
- 4) Mempunyai sumber penghasilan yang tetap dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 5) Mempunyai tabungan uang dari hasil penyisihan yang diperoleh setiap usahanya menghasilkan.

### 3. Sasaran.

a. Sasaran (warga belajar) Kejar Usaha ialah warga masyarakat yang:

- 1) Tidak buta huruf Latin, namun dapat disesuaikan dengan keadaan;
- 2) Umur antara 13 - 44 tahun;
- 3) Minimal sudah memiliki kemampuan dan kegiatan dalam suatu usaha.

b. Kewajiban Warga Belajar.

- 1) Menaati ketentuan yang berlaku dalam Program Kejar Usaha;
- 2) Mengelola usahanya dengan sungguh-sungguh;
- 3) Ikut serta dalam kepengurusan Kejar Usaha;
- 4) Mengikuti kegiatan belajar usaha yang diselenggarakan oleh Pembina/Satgas PIS.
- 5) Menyisihkan sebagian dana yang berasal dari usahanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Hak Warga Belajar :

Sebagai peserta Kejar Usaha warga belajar berhak :

- 1) Menerima pendapatan/insentif berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Kejar Usaha;
- 2) Mendapat keuntungan yang diperoleh dari Kejar Usaha;
- 3) Memberikan saran-saran demi kemajuan Kejar Usahanya.

### 4. Bentuk Kegiatan Belajar.

a. Kegiatan belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara, tetapi tetap dalam ikatan kelompok. Kegiatan belajar :

- 1) Belajar sendiri, yaitu belajar tanpa guru/sumber belajar dan belajar dari apa yang ia lakukan/kerjakan sendiri serta belajar dari pengalaman yang didapatnya;
- 2) Belajar melalui kelompok, yaitu belajar yang dilakukan secara

bersama-sama dalam satu kelompok. Belajar tunjuk tentang apa yang sedang dipelajari kelompok terdiri 3 - 10 orang untuk lebih mempejar dan tujuan usaha;

- 3) Belajar melalui penataran atau latihan yang oleh pelaksana, penyelenggara atau pembina pr organisasi masyarakat.

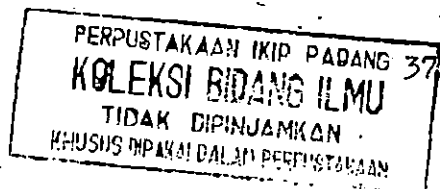
b. Pembentukan kelompok belajar didasarkan atas :

- 1) Kebutuhan yang dirasakan bersama;
- 2) Kesatuan minat dan hasrat untuk belajar bersama;
- 3) Kesesuaian antar anggota dalam kelompok;
- 4) Kesanggupan dan kesediaan untuk belajar berkelompok sampai berhasil;
- 5) Jarak tempat tinggal sesama warga belajar berdekatan. Kegiatan belajar dan berusaha sebagaimana diutarakan di atas pada prinsipnya tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi selalu saling mendukung satu sama lain.

c. Untuk melaksanakan kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha maka perlu dibentuk pengurus Kerja Usaha yang susunan lengkapnya terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Urusan Pemasaran dan produksi.

d. Perincian tugas dan tanggungjawab pengurus ialah :

- 1) Ketua :
  - a) Memimpin seluruh kegiatan kelompok
  - b) Menandatangani surat-surat atas nama kelompok;
  - c) Memberikan persetujuan atas setiap pengeluaran uang oleh Benda Bendahara;
  - d) Bertanggungjawab atas kegiatan kelompok, baik ke dalam maupun ke luar.
- 2) Sekretaris :
  - a) Membantu Ketua dalam memimpin kelompok;
  - b) Menyelenggarakan administrasi kelompok;
  - c) Merencanakan dan bertindak sebagai koordinator dalam kegiatan-



an belajar.

- 3) Bendahara :
  - a) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan inventarisasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b) Menyimpan dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua;
  - c) Menyusun Rencana Anggaran usaha untuk disahkan di dalam rapat anggota kelompok.
- 4) Bidang Produksi :

Merencanakan dan bertindak sebagai koordinator dalam hal memproduksi barang/jasa.
- 5) Bidang Pemasaran :

Merencanakan dan melaksanakan pemasaran (termasuk promosi) hasil usaha.
- 6) Apabila jumlah warga belajar kurang dari 5 orang, maka tugas-tugas tersebut dapat dirangkap oleh anggota lainnya.

#### 5. Sumber Belajar.

- a. Sumber belajar ialah warga masyarakat yang bersedia menjadi sumber pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengusahakan mata pencaharian.
- b. Yang dapat menjadi sumber Kejar Usaha ialah :
  - 1) Warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu di bidang usaha yang bersangkutan.
  - 2) Warga belajar Kejar Usaha itu sendiri yang memiliki kelebihan di bidang pengetahuan dan keterampilan daripada teman-temannya di bidang usaha yang bersangkutan.
  - 3) Diutamakan bagi warga masyarakat yang telah/pernah mengikuti program peningkatan sumber belajar Kejar Usaha.
  - 4) Mempunyai jiwa kekeluargaan dan semangat bekerja serta berusaha tinggi.
- c. Tugas dan kewajiban sumber belajar ialah membelajarkan warga belajar, dengan :
  - 1) Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada



warga belajar;

- 2) Membantu warga belajar dalam belajar, bekerja dan berusaha;
- 3) Menumbuhkan dan membina sikap mental berusaha dari warga belajar;
- 4) Menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan;
- 5) Bertanggungjawab kepada pelaksana Program Kejar Usaha.

d. Hak Sumber Belajar ialah :

- 1) Hak yang sekaligus terdapat di dalam tugas kewajiban; hak mengajar, melatih, memotivasi, mengawasi, menilai dan sebagainya.
- 2) Hak mengikuti latihan sumber belajar yang diselenggarakan oleh Pendidikan Masyarakat;
- 3) Hak memperoleh imbalan yang dihasilkan oleh Kejar Usaha.

6. Program Belajar.

a. Program belajar disusun bersama antara warga belajar dan sumber belajar, dengan petunjuk dan bimbingan Penilik Pendidikan Masyarakat. Program belajar Kejar Usaha disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. Oleh karena itu akan terdapat perbedaan program belajar antara Kejar Usaha satu dengan lainnya sebagai akibat kebutuhan yang berbeda.

b. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari ialah :

- 1) Pengetahuan tentang bahan dan alat untuk produksi;
- 2) Cara membuat dan menghasilkan barang yang laku dijual;
- 3) Cara memasarkan jasa dan produksi;
- 4) Cara menyelenggarakan administrasi usaha;
- 5) Cara mengelola dana belajar usaha;
- 6) Cara mengembangkan usaha;
- 7) Cara membiasakan diri melakukan kebiasaan berusaha.

c. Proses belajar dalam Kejar Usaha berlangsung secara terpadu atau terintegrasi dengan proses bekerja dan berusaha. Pengetahuan dan keterampilan tersebut diperoleh warga belajar dari pelaksanaan pekerjaan dan usaha. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil proses belajar secara langsung berpengaruh terhadap produksi baik jumlah maupun mutunya. Dengan demikian maka proses

belajar itu berlangsung antara lain pada saat : melakukan pencatatan, melakukan surat-menyurat, membuat laporan, membuat transaksi jual beli, membuat perhitungan modal, menghitung biaya produksi/jasa dan keuntungan, membuat pembukuan, pengolahan, pemasaran produksi/jasa, pertemuan-pertemuan, rapat anggota, dan sebagainya.

d. Cara belajar yang dikembangkan oleh Kejar Usaha ialah antara lain:

- 1) Belajar sendiri, yakni warga belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu dibidang usaha dari pengalamannya melakukan pekerjaan.
- 2) Saling belajar, yakni saling asah, asih dan asuh dalam arti bahwa warga belajar yang merasa kurang tahu dalam hal tertentu belajar kepada warga belajar lainnya yang lebih tahu.
- 3) Belajar bersama, yakni saling asah, asih dan asuh dalam arti tanpa bimbingan sumber belajar di bawah pimpinan Ketua Kejar Usaha mengisi dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dibidang usahanya.
- 4) Kursus, yakni warga belajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dibidang usahanya dengan bimbingan sumber belajar sebagai sumber informasi.
- 5) Magang, yakni warga belajar ikut belajar, bekerja, berusaha dalam suatu Kejar Usaha tertentu kepada orang yang sudah mahir dan trampil.

#### 7. Dana Belajar Usaha.

- a. Dana belajar usaha adalah dana berupa uang untuk merangsang, menumbuhkan, dan mengembangkan berbagai bentuk kegiatan belajar usaha yang menghasilkan jasa dan produksi.
- b. Dana belajar untuk pelaksanaan Program Kejar Usaha diperoleh dari:
  - 1) Proyek Pendidikan Non Formal/Dikmas;
  - 2) Proyek Peningkatan Peranan Wanita untuk Keluarga Sehat dan Sejahtera ( PZW - KSS ).
  - 3) Bantuan Luar Negeri ( Unicef, ASPBAE, UNESCO ).
  - 4) Dari hasil penyisihan Kejar Usaha sebelumnya.

c. Besarnya dana belajar usaha maksimal Rp. 200.000,- tiap Kejar Usaha; walaupun demikian tidaklah tertutup kemungkinan adanya Kejar Usaha yang membutuhkan dana belajar usaha dalam jumlah lebih besar atau lebih kecil daripada ketentuan tersebut di atas.

d. Sasaran penerima Dana Belajar Usaha :

- 1) Kelompok : Sekelompok warga masyarakat yang terdiri dari minimal tiga orang atau lebih yang memiliki suatu kegiatan usaha dan berkeinginan untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Perorangan: Seseorang yang memiliki kemampuan dan kegiatan dalam suatu usaha, tetapi masih berkeinginan untuk mengembangkan usahanya serta memiliki kecakapan untuk menularkan pengetahuan dan keterampilannya kepada sekelompok masyarakat sekelilingnya.

e. Syarat pemberian dana belajar usaha.

Dana belajar usaha hanya dapat diberikan kepada warga belajar atau kelompok belajar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mata pencaharian yang diusahakan :

- a) Bahan dasar untuk kegiatan usaha mudah diperoleh ;
- b) Sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat;
- c) Hasil usaha minimal dapat dijual atau diuangkan paling lama satu bulan secara terus-menerus;
- d) Jelas komponen belajarnya;
- e) Jelas keuntungan yang akan diperoleh.

2) Penerima Dana :

- a) Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Pedoman Dasar Kejar Usaha, atau pola pengembangan yang telah disyahkan;
- b) Sanggup menyisihkan dana yang besarnya tetap secara berkala sesuai dengan pola penyesihan yang digunakan.
- c) Sanggup menyetorkan dana penyesihan untuk disimpan di BRI/ Kantor Pos atau Lembaga Perkreditan Resmi (LPR); atas nama rekening Penilik Dikmas;

- d) Bersedia menerima pembinaan dari Penilik Dikmas;
- e) Sanggup mengembalikan dana belajar yang telah diterima apabila ternyata dana tersebut disalahgunakan.

#### 8. Sarana Belajar

Sarana belajar Kejar Usaha ialah alat, perabot dan perlengkapan minimum lainnya yang merupakan persyaratan mutlak guna menjamin berlangsungnya proses kegiatan belajar, bekerja dan berusaha.

Sarana belajar Kejar Usaha dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Sarana penunjang seperti kursi/tempat duduk, meja, lemari, rak dan sebagainya.

b. Sarana produksi :

- 1) Alat produksi yaitu perlengkapan minimum yang harus ada untuk menjamin berlangsungnya proses kegiatan usaha.
- 2) Bahan dasar/bahan habis pakai ialah zat atau barang kebutuhan dasar dalam proses kegiatan usaha. Bahan dasar harus mudah diperoleh.

3) Sarana administrasi :

a) Papan nama Kejar Usaha, yang minimal memuat :

- (1) nama dan nomor urut Kejar Usaha;
- (2) jenis usaha yang dikelola;
- (3) no surat Keputusan, tanggal pembentukan.

b) Daftar warga belajar dan sumber belajar;

c) Buku/daftar kegiatan (jadwal) usaha/kegiatan belajar;

d) Buku/daftar keadaan keuangan Kejar Usaha.

#### 9. Pamong (Penyelenggara, Pelaksana dan Pembina) Kegiatan Belajar.

a. Penyelenggara Program Kejar Usaha ialah :

- 1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Satuan Tugas Pendidikan Masyarakat (Satgas Dikmas di tingkat Desa).
- 2) Organisasi masyarakat yang berfungsi, serta memiliki program pendidikan, sepanjang LKMD/Satgas PLS di daerah tertentu belum berfungsi.
- 3) Organisasi yang kegiatannya terbatas di lingkungan kantor/institusi/lembaga/perusahaan dan industri.

4) Tugas penyelenggara ialah :

- a) Menyusun program penyelenggaraan Kejar Usaha;
- b) Mengadakan akad kerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat;
- c) Membina dan memberi bimbingan kepada pelaksana Kejar Usaha;
- d) Membantu proses pemasaran hasil usaha yang dianggap kurang maju dari kelompok yang dibinanya;
- e) Menyusun laporan perkembangan Kejar Usaha yang dibinanya kepada Penilik Pendidikan Masyarakat setiap bulan;
- f) Mempersiapkan calon-calon penerima Dana Belajar Usaha (DBU) baru;
- g) Memberi rekomendasi kepada Kejar yang dianggap/dinilai mampu untuk menggunakan Dana Belajar Usaha (DBU).

b. Pelaksana Program Kejar Usaha ialah organisasi, lembaga, paguyuban dan sebagainya :

- 1) Yang termasuk organisasi ialah : PKK, Dharma Wanita, Dharma Per-tiwi, Organisasi Keagamaan, KNPI, Hansip, Pramuka, dan Badan Kon-tak Wanita Koperasi.
- 2) Yang termasuk Lembaga ialah : Koperasi, Yayasan, Mesjid, Pondok pesantren, Gereja, banjar, rukun warga, rukun tetangga, kursus-kursus, sekolah-sekolah dan lain sebagainya.
- 3) Yang termasuk paguyuban ialah arisan, kontak tani, kelompen capir, petani pemakai air, paguyuban aksara dan upajiwa, dan lain seba - gainya.
- 4) Tugas Pelaksana ialah :
  - a) Menyusun program pelaksanaan Kejar Usaha bersama kelompok be-lajar di bidang usaha yang akan dikelola di bidang kegiatan be-lajar dan berusaha.
  - b) Mengusulkan program kepada penyelenggara.
  - c) Mencatat/membukukan keuangan berdasarkan laporan dari Kejar - Usaha.
  - d) Membina dan memotivasi Kejar Usaha secara terus-menerus.
  - e) Menyusun laporan pelaksanaan dan keuangan Kejar Usaha kepada Penilik Dikmas setiap triwulan dengan tembusan kepada penye - lenggara.

c. Pembina Program Kejar Usaha :

Pembina program Kejar Usaha ialah petugas program Pendidikan Masyarakat mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, sampai Desa :

1) Tugas Pembina di tingkat propinsi :

- a) Menginformasikan kepada Kasi Dikmas di Kandepkab/Kodya tentang tersedianya Dana Belajar Usaha;
- b) Menetapkan wilayah kabupaten/kodya yang memperoleh jatah dana belajar usaha serta jumlah yang dialokasikan kepada kabupaten/kodya yang bersangkutan;
- c) Menyebarkan petunjuk pelaksanaan Program Kejar Usaha untuk dipergunakan oleh para Kasi/Penilik Dikmas dalam melaksanakan Program Kejar Usaha;
- d) Menetapkan pembentukan Kejar Usaha yang diusulkan oleh Pembina tingkat Kabupaten/Kodya;
- e) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- f) Menerima laporan pelaksanaan dari para Kasi serta mengolah laporan tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Ka. Kanwil dengan tindakan kepada Gubernur kepada Daerah dan kepada Direktur Dikmas;
- g) Mengatur penggunaan dana penyisihan yang terkumpul dari penyertoran Penilik sebesar 25 % Pos C.

2) Tugas Pembina di tingkat Kabupaten/Kodya :

- a) Menampung usulan Program Kejar Usaha dari para Penilik Dikmas, yang selanjutnya dinilai kelayakannya dan menetapkan usulan yang diterima menurut skala prioritas;
- b) Mengusulkan Program Kejar Usaha di Wilayahnya yang disusun menurut skala prioritas kepada Bidang Dikmas setelah dikonsultasikan dengan Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya;
- c) Menerima Dana Belajar Usaha dari Bidang Dikmas dan meneruskan kepada Penilik Dikmas yang programnya telah disetujui;
- d) Membuat petunjuk pelaksanaan di lapangan (Jukpelap) jika diperlukan untuk dipergunakan oleh para penilik dan melaksanakan program Kejar Usaha di lapangan;

- e) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - f) Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan dari Penilik Dikmas yang selanjutnya dilaporkan kepada Pembina tingkat Propinsi dengan tindakan kepada Bupati/Walikota dan Ka Kandep Kab/Kodya;
  - g) Mengatur penggunaan dana penyisihan yang terkumpul dari penyeteraan Penilik sebesar 25 % Pos C.
- 3) Tugas Pembina di tingkat Kecamatan :
- a) Merencanakan Program Kejar Usaha secara bertahap dan bergilir di wilayahnya;
  - b) Menerima dan mengesahkan usulan Program Kejar Usaha dengan penyelenggara;
  - c) Mengirimkan usulan program dan akad kerjasama yang sudah disahkan kepada Ka Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya, dengan tindakan kepada Kasi Dikmas;
  - d) Menerima Dana Belajar Usaha dari Proyek melalui Pembina tingkat Kabupaten, dan menyerahkan dana tersebut kepada Kejar melalui LPR;
  - e) Mengadakan akad kerjasama dengan penyelenggara;
  - f) Membina dengan cara memberi bimbingan dan pengawasan kepada penyelenggara dan pelaksana Program Kejar Usaha;
  - g) Menyusun laporan yang berisi :
    - (1) Perkembangan kelompok, warga belajar, dana belajar dan kegiatan belajar;
    - (2) Masalah dan usul pemecahannya.
  - h) Mengatur penggunaan dana penyisihan hasil usaha dari Kejar Usaha yang disimpan di BRI/Kantor Pos/LPR lainnya sesuai ketentuan dalam buku ini.
- 4) Tugas Pembina di Tingkat Desa/Kelurahan.
- a) Memberikan informasi/penerangan tentang adanya Program Kejar Usaha kepada masyarakat desa;
  - b) Menampung usulan Kejar Usaha dari para pelaksana dan diseleksi kelayakannya untuk diteruskan kepada Penilik Dikmas;
  - c) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - d) Menerima tembusan laporan pelaksanaan dari para pelaksana, sete-

lah diteruskan kepada Penilik Dikmas dengan tindakan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;

- e) Menyusun program penggunaan dana penyisihan yang telah terkumpul di BRI/Kantor Pos/IPR lainnya yang selanjutnya diusulkan kepada penilik Dikmas.

5) Tugas Pelaksana :

- a) Menyusun Program Kejar Usaha bersama anggota Kelompok Pelajar di bidang usaha yang akan dikelolanya;
- b) Mengusulkan Program kepada Penyelenggara dengan tindakan kepada Penilik Dikmas;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d) Membuat laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Penilik Dikmas setiap triwulan, dengan tembusan kepada penyelenggara.

6) Tugas Kejar.

- a) Melaksanakan usaha dengan sungguh-sungguh;
- b) Mengikuti/menjalankan kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh pembina;
- c) Menyerahkan dana penyisihan kepada IPR;
- d) Mencatat keuangan usahanya;
- e) Membuat laporan bulanan kepada Ketua Pelaksana dengan tembusan kepada Penyelenggara.

10. Hasil Belajar Kejar Usaha.

Hasil belajar Kejar Usaha adalah yang dapat dinikmati oleh setiap warga belajar dan warga masyarakat dari kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha itu :

- a. Hasil belajar bekerja berusaha itu dapat berupa :
  - 1) Barang sebagai hasil produksi;
  - 2) Jasa sebagai hasil peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha;
  - 3) Uang sebagai penghasilan/tambahan penghasilan warga belajar;
  - 4) Kejar Usaha baru sebagai hasil penyisihan dana.
- b. Ukuran keberhasilan dilihat dari segi program :
  - 1) Ukuran keberhasilan Program Kejar Usaha :



- a) Semakin banyak warga masyarakat yang mengusahakan mata pencaharian baru;
  - b) Semakin meningkat taraf hidup dan penghidupan masyarakat;
  - c) Masyarakat makin keranjingan belajar, bekerja dan berusaha;
  - d) Kejar Usaha makin melembaga;
  - e) Dana Belajar Usaha yang tersedia makin bertambah.
- 2) Ukuran keberhasilan Kejar Usaha (sebagai lembaga) :
- a) Dana usaha bertambah;
  - b) Hasil produksi meningkat;
  - c) Keuntungan bertambah;
  - d) Perputaran dana bertambah cepat;
  - e) Jenis usaha bertambah;
  - f) Warga belajar bertambah;
  - g) Penghasilan warga belajar bertambah.
- 3) Ukuran keberhasilan warga belajar :
- a) Bidang produksi :
    - (1) Mengetahui bahan dan model hasil produksi. Serta alat produksi, cara menggunakan dan cara memeliharanya;
    - (2) Dapat memilih dan mengolah bahan serta menggunakan dan memelihara alat produksi;
    - (3) Memiliki kreativitas dan jiwa wiraswasta;
  - b) Bidang pemasaran :
    - (1) Mengetahui kebutuhan konsumen, cara dan jalur pemasaran serta keadaan harga pasaran;
    - (2) Dapat berkomunikasi dengan konsumen, mempromosikan dan menjual hasil produksi;
    - (3) Memiliki kepekaan dan hubungan yang baik dengan konsumen dan cara memanfaatkan jalur distribusi.

---

**Sumber** : Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah Dan Masyarakat. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga. Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Dan Masyarakat. Tahun 1987. Bab IV. Halaman 41 - 57